

ABSTRAK

EKA BELA, NPM: 2022010, Judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pajak Restoran Di Kecamatan Amuntai Tengah)”**. Dibawah Bimbingan Ibu **Ni Made Musiyani Anjasmari, M. AP** Sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak **Selamat Riadi, S. Sos, M. AP** Sebagai Dosen Pembimbing II

Pajak restoran merupakan salah satu instrumen pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Di Kecamatan Amuntai Tengah, implementasi kebijakan pajak restoran belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pada Badan Pendapatan Daerah, sehingga proses penetapan dan penagihan pajak belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, komitmen penagihan yang belum konsisten serta komunikasi yang belum merata menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran masih rendah. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pajak restoran, karena pelaksanaan masih mengacu pada SOP pajak daerah secara umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara purposif sampling berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diambil kesimpulan kurang baik, pada sub variabel komunikasi, indikator cukup baik yaitu transmisi dan konsistensi, yang kurang baik indikator kejelasan. Sub variabel sumber daya, indikator yang kurang baik yaitu sumber daya manusia, Informasi, wewenang dan fasilitas. Sub variabel disposisi yang cukup baik yaitu efek disposisi dan yang baik yaitu birokrasi dan insentif. Sub variabel struktur birokrasi, indikator yang kurang baik yaitu fragmentasi (penyebaran) dan standar operasional prosedur. Faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran pemilik restoran dalam membayar pajak, keterbatasan sumber daya manusia di badan pendapatan daerah, kurangnya pemerataan dan kejelasan informasi mengenai pajak restoran kepada pemilik usaha, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP). Faktor yang mendukung yaitu adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, adanya kerja sama dengan instansi lain, dan adanya aplikasi online untuk membayar pajak.

Guna meningkatkan keberhasilan implementasi pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan konsistensi dan pemerataan komunikasi kepada pemilik restoran, menambah sumber daya manusia dan anggaran guna mendukung penagihan lapangan, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pajak restoran agar pelaksanaan penetapan dan penagihan lebih terarah.

ABSTRACT

EKA BELA, NPM: 2022010, title **“IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY NUMBER 6 OF 2021 ON REGIONAL TAXES AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY (A CASE STUDY OF RESTAURANT TAX IN AMUNTAI TENGAH DISTRICT)”**. Under the guidance of **Mrs. Ni Made Musivani Anjasmari, M. AP** as Supervisor I and **Mr. Selamat Riadi, S.Sos., M.AP** as Supervisor II

Restaurant tax is one of the local tax instruments aimed at increasing the Original Local Revenue (PAD) to support regional development financing. In the Amuntai Tengah District, the implementation of restaurant tax policy has not been running optimally. This is due to limited human resources and facilities at the Regional Revenue Agency, so the process of tax assessment and collection cannot be carried out to its fullest extent. In addition, the inconsistent collection commitment and uneven communication have resulted in a low level of awareness and compliance among restaurant taxpayers. Another issue found is the absence of a specific Standard Operating Procedure (SOP) for restaurant tax, as the implementation still refers to the general local tax SOP.

This study uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data sources were obtained by purposive sampling amounting to 12 people. After the data was collected, it was then analyzed using the techniques of Data Reduction, Data Presentation, and Drawing Conclusions. The credibility of the data was tested through extended observation, increasing diligence, triangulation, negative case analysis, using reference materials, and conducting member checks.

The research results indicate that a less favorable conclusion can be drawn. In the communication sub-variable, the fairly good indicators are transmission and consistency, while clarity is the less favorable indicator. In the resources sub-variable, the less favorable indicators are human resources, information, authority, and facilities. In the disposition sub-variable, the fairly good indicator is the disposition effect, whereas bureaucracy and incentives are the favorable indicators. In the bureaucratic structure sub-variable, the less favorable indicators are fragmentation (distribution) and standard operating procedures. The inhibiting factors include a lack of budget, the restaurant owners' low awareness of paying taxes, limited human resources in the regional revenue agency, insufficient distribution and clarity of information regarding restaurant taxes to business owners, and the absence of standard operating procedures (SOP). Supporting factors include the regional regulation Number 6 of 2021 concerning Local Taxes, cooperation with other agencies, and the availability of an online application for paying taxes.

To improve the success of restaurant tax implementation, the Regional Revenue Agency needs to enhance the consistency and equality of communication with restaurant owners, increase human resources and budget to support field collection, and develop a specific Standard Operating Procedure (SOP) for restaurant taxes to make the implementation of assessment and collection more directed.